

DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PENGADILAN

MALING, FEYBI INDRIANI

Pembimbing : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

DISSENTING OPINION

KKB KK-2 THD 07 / 11 Mal d

Copyright© 2010 by Airlangga University Library Surabaya

ABSTRAK

Ratio legis dari prinsip *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan adalah agar putusan yang diambil tersebut benar-benar sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah dari hakim majelis. Tujuan pengaturan prinsip *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan agar dapat digunakan sebagai dasar oleh hakim dalam mengambil suatu keputusan. Sebagaimana pasal 182 KUHP bahwa sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang. Di Indonesia keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam putusan diatur dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sebagaimana Pasal 30 bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Dipertegas pula dalam Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pembahasan di atas adalah jawaban dari permasalahan tesis ini yang difokuskan pada ratio legis dari prinsip *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan dan tujuan pengaturan prinsip *dissenting opinion* dalam peraturan perundang-undangan. Penulis berharap tesis ini bermanfaat.

ABSTRACT

Ratio Legis of principle dissenting opinion in court decisions is that decisions taken are absolutely in accordance with an agreement or consensus of the judges panel. The purpose of the principle dissenting opinion in the legislation to be used as basis by the judge in taking a decision. As article 182 Criminal Code that entered into deliberations after the judge's final decision and if necessary consultation was held after the defendant, witnesses, lawyers, public prosecutors and the audience left the courtroom. The above discussion is the answer to the problems of this thesis is focused on the ratio legis of the principle dissenting opinion in court decisions and goal setting principles dissenting opinion in the legislation. The author hopes this thesis useful.